

**PENGARUH PENERAPAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE MENURUT  
UNDANG-UNDANG (UU) NO 6 TAHUN 2014 DALAM TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DI KELURAHAN DURI BARAT**

Rahmat Ade Zulfian<sup>1</sup>, Jumili Arianto<sup>2</sup>, Indra Primahardani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>PPKn FKIP Universitas Riau

<sup>1</sup>Adegea0199@gmail.com, <sup>2</sup>Jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id,

<sup>3</sup>indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id

**ABSTRACT**

*This research is motivated by political changes in Indonesia, which are followed by increasing issues of decentralization and democratization. The research is directed at evaluating the implementation of Good Governance in Duri Barat Subdistrict, with the aim of explaining field conditions, analyzing government governance, and identifying the influence of Good Governance principles on government governance. This research is quantitative research that uses a statistical approach to analyze the observed symptoms. Conducted in Duri Barat Subdistrict, Duri City, Riau Province, from March to April 2023. The population of this research was all government employees in Duri Barat Subdistrict, with sampling using total sampling because the population was less than 100. The data collected consisted of data primary through questionnaires and interviews. The research instrument includes Good Governance and government governance variables. The data analysis techniques used include simple linear regression analysis, t test, and coefficient of determination test to determine the influence of the independent variable on the dependent variable. Based on the data obtained from 14 employees which were then processed and tested, conclusions can be drawn from the overall results of the test results analysis. Simple linear regression explains that for every additional percentage of Good Governance, government governance increases positively.*

*Keyword: good governance, undang-undang , government governance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan politik di Indonesia yang diikuti dengan meningkatnya isu desentralisasi dan demokratisasi. Penelitian diarahkan untuk mengevaluasi penerapan Good Governance di Kecamatan Duri Barat, dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi lapangan, menganalisis tata kelola pemerintahan, dan mengidentifikasi pengaruh prinsip-prinsip Good Governance terhadap tata kelola pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan statistik untuk menganalisis gejala yang diamati. Dilakukan di Kecamatan Duri Barat, Kota Duri, Provinsi Riau, pada bulan Maret sampai dengan April 2023. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai

pemerintah di Kecamatan Duri Barat, dengan pengambilan sampel menggunakan total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui kuesioner dan wawancara. Instrumen penelitian meliputi variabel Good Governance dan tata kelola pemerintahan.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan data yang diperoleh dari 14 orang karyawan yang kemudian diolah dan diuji, maka dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis hasil pengujian. Regresi linier sederhana menjelaskan bahwa setiap penambahan persentase Good Governance maka tata kelola pemerintahan meningkat secara positif.

Kata Kunci: good governance, undang-undang, government governance

### **A. Pendahuluan**

Perubahan politik dan pemerintahan mengikuti jatuhnya pemerintahan Orde Baru dari kekuasaan. Isu desentralisasi dan demokratisasi semakin disuarakan. Hal ini kemudian berpengaruh pada cabang pemerintahan Legislatif dan Eksekutif yang telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah struktur pemerintahan Indonesia..

Kelurahan merupakan sistem administrasi penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat pembangunan yang paling rendah. Hal ini karena pemerintah kelurahan merupakan tumpuan struktur pemerintahan Indonesia dan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya upaya pembangunan

bangsa secara keseluruhan. beberapa teori. Bagian selanjutnya dapat dipaparkan data-data ataupun fakta-fakta yang mendukung penelitian maupun gagasan pemikiran. Kemudian dapat dipaparkan fokus permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian.

Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang dikirim.

Pemerintahan, pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan diawasi oleh pemerintah Kelurahan serta perangkatnya. Dengan demikian, penting bagi pemerintah kota benar-benar mahir dan siap berkoordinasi dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Karena mereka adalah tingkat pemerintahan paling bawah, maka pejabat kecamatan yang juga diberi tanggung jawab administratif menempati posisi yang sangat penting.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa dan Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Istilah "pemerintahan" digantikan oleh "pemerintahan yang baik", yang mengacu pada pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam penyelenggaraan urusan negara. Sekelompok orang yang mengelola komunitas atau unit dianggap sebagai pemerintah itu sendiri. Melalui kebiasaan negara, lembaga, dan undang-undang, mereka mengelola kebijakan publik serta kekuasaan eksekutif, politik, dan kedaulatan.

Dalam Wulan Dary (2020) Hardiwinoto menyatakan bahwa Good

Government Governance adalah suatu konsep yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan. Tata pemerintahan yang baik suatu negara didasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh pemerintah, warganya, dan administrasi pemerintah.

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, bersih dan sesuai dengan fungsinya, tata kelola yang baik atau disebut juga Good Governance harus diterapkan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik berfungsi sebagai landasan konsep Good Governance (Maryam, 2016). Oleh karena itu, untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, diperlukan suatu sistem pemerintahan negara yang baik.

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahwa semua prinsip tata pemerintahan yang baik di Desa Duri Barat belum dilaksanakan dengan baik, antara lain sebagai berikut: kurangnya transparansi dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang dilakukan masyarakat. dapat memantau.

Dari sisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan data, belum ada website Kelurahan yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya kaum muda untuk mengetahui penggunaan dana Kelurahan secara online. Padahal baliho APBD ada di depan kantor desa, namun ada hal lain yang harus dilakukan masyarakat untuk melihatnya, sehingga tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Kelurahan hanya memberikan laporan kepada DK, RT, dan RW terkait laporan pertanggungjawaban dana Kelurahan. Dalam hal ini, banyak RT dan RW yang tidak memberitahu masyarakatnya bahwa mereka bertanggung jawab atas dana Kelurahan. Mereka tidak peduli tentang itu, jadi mereka mengabaikannya

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Karena gejala yang diamati diubah menjadi angka yang dianalisis dengan menggunakan statistik, maka penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat dianggap sebagai metode penelitian

berdasarkan positivisme yang meneliti populasi atau sampel tertentu. Metode pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak, instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisis data kuantitatif/statistik digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu mulai dari bulan Juli 2023 sampai Agustus 2023 dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Duri Barat, Kota Duri, Provinsi Riau. Dengan total sampel populasi berjumlah 14 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan cara Total Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100, sehingga seluruh populasi yang berjumlah 14 orang tersebut dijadikan sampel penelitian semuanya (Notoatmodjo, 2017).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

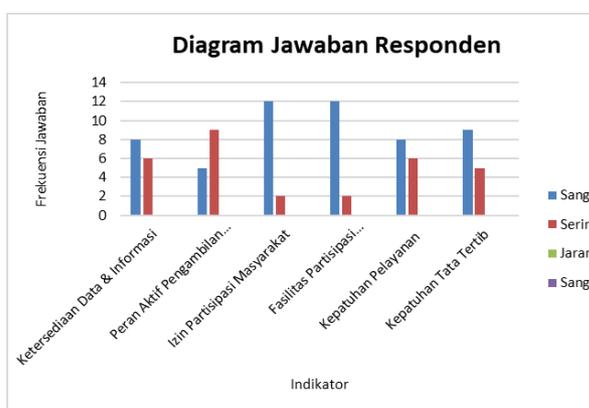
Penelitian ini menggunakan sampel dari pegawai pemerintah Kelurahan Duri Barat yakni sebanyak 14 responden. Berikut uraian tentang Identitas responden yang

dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lama responden bekerja. Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

## **A .Analisis Deskriptif Variabel**

### **1.Variabel Good Governance**

#### **a. Indikator Partisipasi**

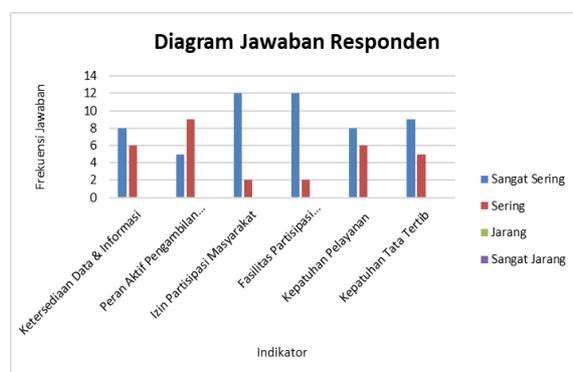


Berdasarkan tabel tanggapan responden mengenai indikator partisipasi dalam variabel Good Governance, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif pada setiap item yang dinilai. Pada aspek ketersediaan data & informasi, peran aktif pengambilan keputusan, izin partisipasi masyarakat, fasilitas partisipasi masyarakat, kepatuhan pelayanan, serta kepatuhan tata tertib, mayoritas responden memberikan jawaban yang

cenderung pada tingkat "Sangat Sering" dan "Sering".

Dalam konteks ini, terdapat konsistensi yang signifikan dalam tanggapan responden, dimana mayoritas dari 84 tanggapan yang tercatat, sebanyak 54 responden menilai aspek partisipasi dalam Good Governance sebagai baik. Dengan total skor 306, variabel ini dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang baik, menandakan adanya kecenderungan positif dari responden terhadap indikator partisipasi dalam variabel Good Governance.

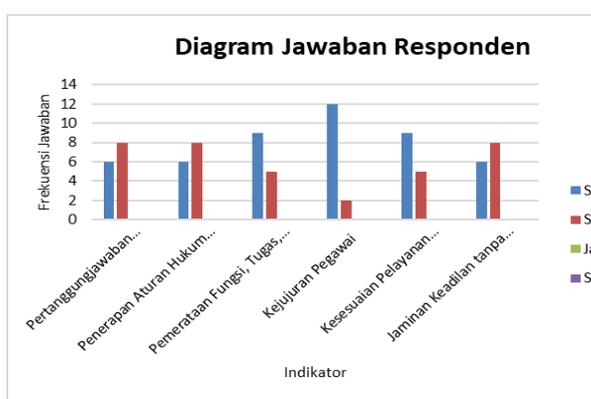
#### **b. Indikator Transparansi**



Berdasarkan data tanggapan responden terhadap indikator transparansi dalam variabel Good Governance, mayoritas responden menilai aspek-aspek yang dievaluasi secara positif dengan tingkat "Sangat Sering" dan "Sering". Terdapat konsistensi yang signifikan dalam penilaian responden terhadap berbagai **indikator transparansi**

dalam Good Governance, seperti ketertiban, keamanan, keterbukaan keuangan, ketersediaan informasi keuangan, aksesibilitas persyaratan pelayanan yang transparan, ketersediaan informasi program kerja, profesionalitas, transparansi pegawai, dan edukasi terkait pungutan liar.

c. Indikator Akuntabilitas



Berdasarkan hasil perhitungan dari tanggapan responden terhadap indikator Akuntabilitas dalam variabel Good Governance, mayoritas responden memberikan penilaian positif pada sebagian besar aspek yang dievaluasi. Skor tertinggi diperoleh pada aspek "Kejujuran Pegawai" dengan skor 54, menandakan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian tinggi terkait kejujuran pegawai dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, skor terendah ternyata ada pada "Pertanggungjawaban Periodis" dan "Penerapan Aturan Hukum yang

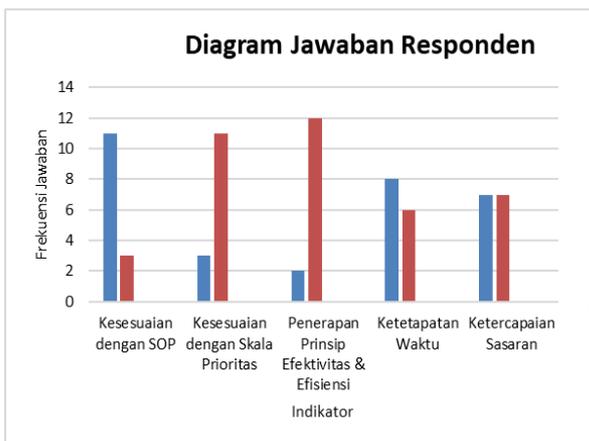
Jelas" dengan skor masing-masing sebesar 48. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil dari responden memberikan penilaian lebih rendah terhadap pertanggungjawaban periodis dan penerapan aturan hukum yang jelas dalam konteks variabel Akuntabilitas.

Meskipun mayoritas aspek dalam indikator Akuntabilitas mendapatkan penilaian positif, terdapat variasi dalam penilaian responden pada setiap item, menunjukkan kompleksitas persepsi mereka terhadap aspek-aspek yang dinilai. Untuk meningkatkan skor pada "Pertanggungjawaban Periodis" dan "Penerapan Aturan Hukum yang Jelas" bisa melibatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan periodis dan pemahaman yang lebih baik terkait aturan hukum yang berlaku. Ini bisa termasuk pelatihan atau penyuluhan terkait prosedur pelaporan yang lebih efektif dan pengkajian kembali aturan hukum yang diperlukan dalam organisasi agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

## 2. Variabel Tata Kelola

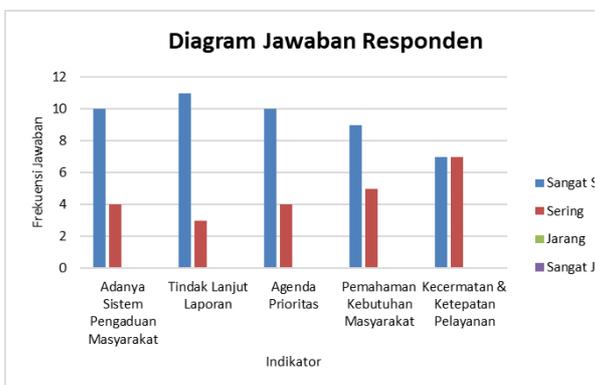
### Pemerintahan

a. Indikator Produktivitas



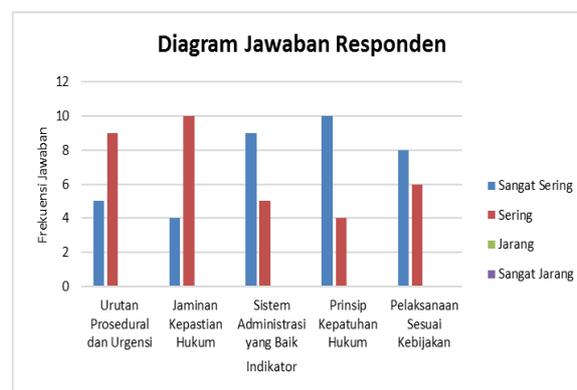
Berdasarkan penilaian responden terhadap indikator Produktivitas dalam variabel Tata Kelola Pemerintahan, hasil perhitungan skor menunjukkan variasi yang signifikan dalam penilaian. Indikator "Kesesuaian dengan SOP" mendapatkan skor tertinggi yaitu 53, menandakan adanya tingkat persetujuan yang tinggi terhadap kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur. Sementara, "Kesesuaian dengan Skala Prioritas" memperoleh skor terendah dengan nilai 45.

**b. Indikator Responsivitas**



Dalam evaluasi indikator Responsivitas Pemerintahan, terdapat perbedaan signifikan dalam penilaian responden terhadap setiap aspek yang dievaluasi. Indikator "Tindak Lanjut Laporan" mencapai skor tertinggi dengan nilai 53, menggambarkan tingkat persetujuan yang tinggi terkait dengan efektivitas tindak lanjut terhadap laporan yang masuk. Di sisi lain, "Kecermatan & Ketepatan Pelayanan" mendapatkan skor terendah dengan nilai 49

**c. Indikator Responsibilitas.**



Berdasarkan hasil perhitungan dari tanggapan responden terhadap indikator Responsibilitas dalam variabel Tata Kelola Pemerintahan, terdapat variasi dalam penilaian pada setiap aspek yang dievaluasi. Indikator dengan skor tertinggi diperoleh pada "Prinsip Kepatuhan Hukum" dengan nilai 52, menunjukkan mayoritas responden sangat setuju bahwa prinsip

kepatuhan hukum dijalankan dengan baik. Sementara itu, "Urutan Prosedural dan Urgensi" merupakan indikator dengan skor terendah yaitu 47, meskipun mayoritas responden setuju, namun terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat persetujuan responden pada aspek ini.

## **B. Uji Variabel**

### **1. Uji Validitas dan Uji**

#### **Reliabilitas**

Berdasarkan Uji Validitas dan Uji Realibilitas yang dilakukan oleh penguji menyatakan bahwa data yang diperoleh tersebut valid dan reliabel sehingga data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal

### **2. Uji Linearitas**

Dalam menganalisis data uji linearitas dengan ANOVA, peneliti mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu "Tata Kelola \* Good Governance" dan "Derivation from Linearity." Hasil uji linearitas untuk faktor pertama menunjukkan bahwa nilai F yang dihitung sebesar 2,341 dengan signifikansi sebesar 0,177. Nilai kritis F tabel sebesar 4,28 berarti tidak bisa menolak hipotesis nol, yang menunjukkan bahwa tidak ada efek linier yang signifikan pada interaksi antara Tata Kelola dan Good Governance.

Selain itu, hasil untuk faktor "Derivation from Linearity" menunjukkan nilai F yang dihitung sebesar 1,928 dengan signifikansi sebesar 0,222. Dengan membandingkan nilai ini dengan nilai kritis F tabel sebesar 4,28, peneliti juga tidak menemukan cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Oleh karena itu, pada tingkat signifikansi yang ditentukan, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat efek linier yang signifikan pada "Derivation from Linearity."

### **3. Uji Linear Sederhana**

Hasil uji linear sederhana antara variable independent Good Governance (X) terhadap variable dependen Tata Kelola (Y). Didapat nilai constant dari variable dependen Tata Kelola (Y) sebesar  $a = 30,415$ , serta nilai  $b_1 = 0,357$ . Sehingga dapat dituliskan persamaan regresi linear berganda  $Y = 30,415 + 0,357X$ . Artinya jika variabel independent Good Governance (X) tidak mengalami perubahan dan nilainya tetap, maka variabel Tata Kelola (Y) nilainya sebesar 30,415. Sementara untuk setiap penambahan 1% Good Governance (X), maka Tata Kelola bertambah sebesar 0,357.

#### **4. Koefisien Determinasi**

Hasil menunjukkan nilai R Square sekitar 0,118, yang mengindikasikan bahwa sekitar 11,8% variasi dalam Tata Kelola Pemerintahan dapat dijelaskan oleh faktor Good Governance yang dimasukkan ke dalam model. Meskipun ada hubungan yang positif antara Good Governance dan Tata Kelola Pemerintahan (ditunjukkan oleh nilai korelasi sekitar 0,343), nilai R Square yang rendah menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar variabel Good Governance juga memengaruhi dan menjelaskan variasi dalam Tata Kelola Pemerintahan. Nilai R Square yang relatif rendah ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa model yang diterapkan mungkin tidak secara memadai menjelaskan kompleksitas hubungan antara kedua variabel, atau terdapat faktor-faktor lain di luar model yang memberikan kontribusi pada variasi yang tidak dapat dijelaskan.

Dengan demikian penerapan prinsip Good Governance (tata pemerintahan yang baik) dalam lingkup pemerintahan kelurahan, seperti Kelurahan Duri Barat, memiliki dampak yang signifikan terhadap tata

kelola pemerintahan. Good Governance adalah sebuah konsep yang menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan responsivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks penerapan prinsip Good Governance di Kelurahan Duri Barat, terlihat adanya hubungan teori Good Governance yang mementingkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan standar waktu penyelesaian layanan telah berdampak signifikan dengan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi yang ditekankan dalam Good Governance. Dapat diamati bahwa ketika standar pelayanan publik dijalankan dengan baik sesuai prinsip-prinsip Good Governance, terlihat dari transparansi biaya pelayanan yang meningkat, memperkuat kesan bahwa pemerintahan setempat beroperasi dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi

Analisis mengenai penerapan prinsip Good Governance di Kelurahan Duri Barat memberikan

gambaran yang menarik terkait peran standar pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar waktu penyelesaian layanan memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Good Governance yang menekankan pentingnya efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Ditemukannya peningkatan transparansi biaya pelayanan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat juga mencerminkan implementasi prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan.

Penerapan Good Governance memerlukan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Ketika pegawai kelurahan Duri Barat menjalankan pemerintahan dengan transparan, masyarakat memiliki akses yang lebih baik kepada informasi terkait dengan kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Ini membantu masyarakat untuk memahami bagaimana sumber daya publik digunakan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Good Governance mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pegawai kelurahan Duri Barat harus berusaha melibatkan warga dalam diskusi, konsultasi, dan pemantauan kebijakan dan program yang ada. Partisipasi masyarakat membantu menjamin bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga setempat.

Penerapan Good Governance menuntut akuntabilitas yang ketat. Pegawai kelurahan Duri Barat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini berarti jika ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika, tindakan disipliner harus diambil. Akuntabilitas juga mencakup keterbukaan dalam penggunaan anggaran publik dan pelaporan yang akurat.

## **E. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kelurahan Duri Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari 14 pegawai yang kemudian diolah dan diuji, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis hasil uji regresi linear sederhana menjelaskan bahwa untuk setiap penambahan persentase Good Governance (X1),

maka tata kelola pemerintahan meningkat secara positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik konstanta dan koefisien regresi untuk variabel adalah bernilai positif

Penerapan Good Governance berpengaruh positif simultan terhadap tata kelola pemerintahan pegawai Kelurahan Duri Barat. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan bahwa Good Governance berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan. Hasil menunjukkan nilai R Square sekitar 0,118, yang mengindikasikan bahwa sekitar 11,8% variasi dalam Tata Kelola Pemerintahan dapat dijelaskan oleh faktor Good Governance yang dimasukkan ke dalam model. Meskipun ada hubungan yang positif antara Good Governance dan Tata Kelola Pemerintahan (ditunjukkan oleh nilai korelasi sekitar 0,343), nilai R Square yang rendah menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar variabel Good Governance juga memengaruhi dan menjelaskan variasi dalam Tata Kelola Pemerintahan. Kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu

ataupun penelitian lanjutan yang relevan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Almasri, dan Muammar Alkadafi. (2018). *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru Cahaya Firdaus.
- Arikunto, Suharsimi (1998). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (S. Saat (ed.); 07 ed.)*. Erlangga.
- Bastian, I. (2016). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. In *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah (M. N. Muliawati (ed.))*. PT Remaja Rosdakarya
- Ardin Dolok Saribu. (2017). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good government governance terhadap efektivitas kinerja pegawai badan pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintahan kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Vol 20.92-107.
- Claudya, J. B. (2020). Pengaruh Good Governance dan sistem

pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ketapang dengan akuntabilitas publik sebagai variabel mediasi. Maryam, N. S. (2016). JIPSi. In *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik: Vol. VI (Issue 1)*

Fitriyah, N., Indrayono, Y., & Dessy, H. (2019). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Bogor, 13.

Hutapea, F. L., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ( Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia ). 9(1), 173–186.